

DINAMIKA LEGISLATIF DALAM PENGAJUAN USULAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA TERKAIT FORMULA E

IKA DIAH NAWANGSARI

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif di tingkat lokal yang memiliki seperangkat hak dalam pelaksanaan fungsinya. Salah satu seperangkat hak tersebut adalah hak interpelasi yang merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut kepada kepala daerah mengenai kebijakan penting dan berdampak luas. Usul Hak Interpelasi pernah digulirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta oleh 2 (dua) Fraksi DPRD Provinsi terhadap Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 yaitu terkait program Formula E. Penelitian ini berfokus pada proses usul hak interpelasi Formula E yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dari Gubernur. Terdapat perbedaan posisi dan pandangan fraksi terkait urgensi usul hak interpelasi Formula E sehingga menimbulkan dinamika di internal DPRD. Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi serta teori *bargaining politic* menurut Gideon Doron dan Itai Sened.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yaitu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024 dari 5 Fraksi. Penelitian ini menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi fragmentasi posisi fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024 dalam pengajuan usul hak interpelasi terkait Formula E. Fragmentasi tersebut terbagi menjadi Fraksi Pengusul Interpelasi dan Fraksi Non Pengusul Interpelasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat kuorum agenda Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Usul hak Interpelasi.

Kata Kunci: DPRD, Fraksi, Formula E, Hak Interpelasi, Rapat Paripurna

**THE LEGISLATIVE DYNAMICS IN SUBMITTING INTERPELLATION
RIGHTS SCHEME OF PROVINCIAL LEGISLATIVE COUNCIL
AGAINST THE GOVERNOR OF DKI JAKARTA RELATED FORMULA
E**

IKA DIAH NAWANGSARI

ABSTRACT

The Regional People's Representative Council is a legislative institution at the local level that has a set of rights in carrying out its functions. One of these rights is the right of interpellation, which is the right of the DPRD to request further information or explanations from the regional head regarding important and broad-based policies. The Proposal for the Right of Interpellation was rolled out in the administration of the regional government of DKI Jakarta Province by 2 (two) Factions of the Provincial Legislatives Council against the Governor of DKI Jakarta 2017-2022, related to the Formula E. This research focuses on the process of the proposed Formula E right of interpellation submitted by the PSI and PDI Perjuangan factions of the Provincial Legislative Council to receive a further explanation from the Governor. There are differences in the positions and views of the factions regarding the urgency of the proposed Formula E right of interpellation, giving rise to internal dynamics within the DPRD. This study uses the theory of coalition formation and bargaining politics theory according to Gideon Doron and Itai Sened.

The method used in this research was descriptive qualitative by collecting primary and secondary data. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with informants, namely members of the DKI Jakarta Provincial Legislative Council Periode 2019-2024 from 5 factions. This study utilized four stages of data analysis according to Milles and Huberman, such as data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study discovered a fragmentation upon the positions of the 2019-2024 DKI Jakarta Provincial Legislative Council factions in submitting proposals for interpellation rights related to Formula E. The fragmentation was divided into Interpellation Proposers and Non-Interpellation Proposers Factions which resulted in quorum nonconformity on the "Decision-Making Plenary Meeting on the Proposed Right of Interpellation".

Keywords: DPRD, Faction, Formula E, Plenary Meeting, Right of Interpellation